

MoU E-Auditee

BPK Jamin Data Pemprov dan Pemkab Aman

Abdul Khoir

Borneo Tribune, Pontianak

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menjamin data-data yang dimiliki Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota aman.

Lembaga tinggi Negara ini juga memastikan data tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan di luar kewenangan BPK dan juga telah dilindungi sistem jaringan terkoneksi.

Sejak ditandatanganinya nota kesepakatan (MoU) tersebut, (16/6)-di kantor BPK RI, secara otomatis antara data di server pemerintah provinsi atau kabupaten kota akan terkoneksi guna mempercepat proses perekaman, pengolahan, pemanfaatan dan monitoring atau data elektronik (*E-Auditee*).

"Data hanya BPK yang bisa mengaksesnya, karena data pengelolaan keuangan tersebut masih mentah,

namun hasilnya bisa diakses oleh semua pihak dengan mekanisme yang sudah ada," kata Ketua BPK RI, Hadi Poernomo.

Sementara itu, untuk kabupaten/kota yang saat ini belum memiliki akses internet yang pastinya BPK tidak dapat memafaatkan teknologi yang juga digagas di 15 Provinsi di Indonesia itu, BPK menggunakan sistem jempot data (*innova-link*) dan kondisi daerah yang demikian akan mendapat pembinaan khusus.

Sementara itu, untuk Kalbar dari 14 kabupaten kota yang setiap tahunnya harus menyerahkan laporan keuangan ke BPK, masih tersisa Kabupaten Landak yang hingga kini belum menyerahkan laporan dan hingga saat ini masih ditunggu.

"Hasil pemeriksaan masih dalam proses dan secepatnya akan disampaikan hasilnya, namun masih ada Landak yang belum menye-



Adi Sudibyo. FOTO Abdul Khoir/Borneo Tribune

rahan laporan," kata Kepala Perwakilan BPK RI kalbar, Adi Sudibyo yang mendampingi ketua BPK RI.

Alasan mengapa Kabupaten Landak belum menyerahkan laporan tersebut menurut menurut Sudibyo dirinya belum mengetahui secara persis, namun dirinya memaklumi hal tersebut karena kabupaten Landak saat ini baru saja menyelesaikan tahapan Pemilukada dan hal tersebut bisa saja menjadi alasan keterlambatan tersebut. □